



Strategi politik golkar pasca orde baru: Studi kasus pemilihan legislatif 2019 di daerah pemilihan Jawa Barat VIII

Husnul Jamil^{1*}, Rahmat Kurniawan²

¹Universitas Indonesia, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Correspondance: husnuljamil01@gmail.com

Received: 10 October 2023; Reviewed: 11 November 2023; Accepted: 28 December 2023

Abstract: This article explains the political strategy taken by the Golkar Party to achieve victory in the legislative elections in West Java VIII. After the New Order, the Golkar Party experienced a gradual decline in electoral support throughout successive election cycles. However, in the 2019 legislative elections, Golkar emerged as the leading party in terms of vote acquisition in the West Java VIII electoral district. This research uses a qualitative research approach using literature studies as data collection to obtain research findings. According to this research, the Golkar Party's political strategy begins with an internal party consolidation process. The party's agenda significantly emphasizes enhancing economic development and strengthening cadres and wings. The Golkar Institute, an organization dedicated to political training, actively seeks and recruits young people to become cadres. In the 2019 election campaign in the West Java VIII electoral district, the Golkar Party implemented a firm policy of zero tolerance towards its members involved in legal procedures. This approach effectively upholds the party's reputation and grows public trust. Golkar is actively collaborating with many community and youth organizations in order to maintain the democratic process during the 2019 election in the West Java VIII electoral district. Golkar in the West Java VIII electoral district has engaged the services of political experts to improve their understanding of geopolitics. The decision to take this alternative was motivated by the party's limited technical resources in the fields of surveys, advertising and Big data processing. The consultants were brought in because of the party's emphasis on voter management. The Golkar Party utilizes big data obtained from social media platforms to formulate campaign programs that effectively respond to changing voter demographics, with particular emphasis on increasing political campaign funding, the influence of young voters and expanding internet and social media accessibility.

Keywords: political strategy; golkar party; 2019 election; legislative election

Abstrak: Artikel ini menjelaskan strategi politik yang dilakukan Partai Golkar untuk meraih kemenangan pada pemilu legislatif di Jawa Barat VIII. Setelah Orde Baru, Partai Golkar mengalami penurunan dukungan elektoral secara bertahap sepanjang siklus pemilu berturut-turut. Namun pada pemilu legislatif 2019, Golkar tampil sebagai partai unggulan dalam perolehan suara di daerah pemilihan Jawa Barat VIII. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur sebagai pengumpulan data untuk memperoleh temuan penelitian. Menurut penelitian ini, strategi politik Partai Golkar diawali dengan proses konsolidasi internal partai. Agenda partai secara signifikan menekankan peningkatan pembangunan ekonomi dan penguatan kader dan sayap. Institut Golkar, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk pelatihan politik, aktif mencari dan merekrut generasi muda untuk menjadi kader. Pada kampanye pemilu tahun 2019 di daerah pemilihan Jawa Barat VIII, Partai Golkar menerapkan kebijakan tegas nihil toleransi terhadap anggotanya yang terlibat prosedur hukum. Pendekatan ini efektif menjaga reputasi partai dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Golkar aktif menjalin kerja sama dengan banyak organisasi masyarakat dan pemuda demi menjaga proses demokrasi pada pemilu 2019 di daerah pemilihan Jawa Barat VIII. Golkar di daerah pemilihan Jawa Barat VIII telah melibatkan jasa pakar politik untuk meningkatkan pemahaman geopolitik. Keputusan mengambil alternatif ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya sumber daya teknis partai di bidang survei, periklanan, dan pengolahan Big data. Konsultan didatangkan karena partainya menekankan pada manajemen pemilih. Partai Golkar memanfaatkan data besar yang diperoleh dari platform media sosial untuk merumuskan program

kampanye yang secara efektif merespons perubahan demografi pemilih, dengan penekanan khusus pada peningkatan dana kampanye politik, pengaruh pemilih muda, dan perluasan akses internet dan media sosial.

Kata Kunci: strategi politik; partai golkar; pemilu 2019; pemilihan legislatif

© 2024 The Author(s)

<https://doi.org/10.30738/sosio.v10i1.16046>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#)

PENDAHULUAN

Partai Golkar memiliki sejarah yang panjang dan kuat di panggung politik Indonesia. Berdiri pada tahun 1964, Golkar pada awalnya berjalan sebagai organisasi masyarakat yang bernama Golongan Fungsional yaitu wadah bagi kelompok fungsionaris, pebisnis, dan petani yang ingin mendukung pemerintahan yang dipimpin oleh Soekarno, yang kemudian bertransformasi menjadi partai politik pada tahun 1973. Di bawah pemerintahan Soeharto, Partai Golkar menjadi partai dominan dan memiliki peran penting dalam politik Indonesia (Areza et al., 2023; Nisa et al., 2017; Suryadinata, 1989). Di masa orde baru, Golkar menjadi organisasi yang dianggap berjaya, tampil sebagai *single majority* atas dasar dominasinya yaitu konsisten memperoleh suara mayoritas di atas 60 persen dalam enam kali pemilu (Suhawi, 2018; Nida & Simarmata, 2014). Kejayaan Golkar di masa tersebut tidak terlepas pendekatan politiknya menuai kontroversi karena adanya dugaan manipulasi suara melalui dukungan militer, birokrasi, dan organisasi Korpri (Puspita, 2012).

Meskipun mempunyai kendali yang signifikan terhadap lanskap politik pada masa Orde Baru, bukti empiris menunjukkan bahwa Partai Golkar mengalami penurunan pengaruh setelah masa reformasi. Jatuhnya Orde Baru pada Mei 1998 sempat menempatkan Partai Golkar dalam the “*years of living dangerously*”. Menurut Djuyandi dan Akbar (2023), Golkar memperoleh 22,43 persen suara nasional secara keseluruhan pada pemilu 1999. Demikian pula pada pemilu 2004, Golkar memperoleh suara terbanyak kedua, yaitu 21,57 persen. Namun demikian, perlu dicatat bahwa Golkar mengalami penurunan perolehan suara nasional pada pemilu tahun 2009 dan 2014, seperti yang dilaporkan oleh BPS (2020).

Penurunan perolehan suara Partai Golkar disebabkan oleh sejumlah faktor internal, seperti kegagalan dalam mengelola faksionalisme internal, masalah kaderisasi, penyimpangan dalam rekrutmen, kepemimpinan internal yang kurang akar ke bawah, dan kesalahan dalam komunikasi politik. Krisis identitas ideologi partai juga turut berperan sebagai penyebab utama. Di samping itu, faktor eksternal yang tidak terduga, seperti persepsi negatif publik terhadap posisi Golkar dalam pemerintahan, kehadiran partai pecahan seperti Gerindra dan Hanura, serta ketidakmampuan mengantisipasi

sistem suara terbanyak, semuanya ikut memengaruhi penurunan dukungan tersebut (Yuda AR, 2011).



Sumber: BPS 2019

Gambar 1. Perolehan Suara Partai Golkar dalam Pemilu 1999-2019

Meskipun demikian, Golkar berupaya meningkatkan elektabilitas dengan menyesuaikan diri dengan beragam keadaan dan merumuskan taktik politik yang unggul, dengan tujuan untuk mengulangi dominasinya seperti pada masa sebelumnya (Kurnia, 2021). Reputasi Partai Golkar yang menonjol sebagai entitas politik yang cukup besar dan mapan menghadirkan fenomena politik yang patut diperhatikan, yaitu besarnya dukungan yang diterimanya dari masyarakat Jawa Barat. Hasil pemilu 2019 menunjukkan Golkar tampil sebagai partai politik unggulan di wilayah Jawa Barat VIII dengan perolehan suara terbanyak. Hal ini terutama terlihat pada perolehan suara para calon legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPR RI) dari keseluruhan penghitungan suara di tiga daerah pemilihan di wilayah Jawa Barat VIII (KPU, 2019). Pemilu 2019 merupakan periode kontestasi politik yang menarik; ditandai dengan pergeseran strategi kampanye partai politik yang mulai melakukan pendekatan digital; dengan pemanfaatan media sosial. Secara khusus, ada penerapan pendekatan ofensif yang dilakukan partai-partai dengan aktif terlibat dalam menargetkan kubu regional lawan mereka. Manuver strategis ini menjadi sinyal yang mendorong partai-partai untuk mengintensifkan upaya mereka dalam menjaga pendukung setia dan basis masing-masing.

Keberhasilan Partai Golkar dalam merumuskan keputusan legislatif di Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII tidak lepas dari beragamnya strategi yang dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan para konstituen yang berada di Daerah Pemilihan Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon. Berdasarkan survei yang dilakukan Mujani (2023), individu yang memilih Partai Golkar adalah mereka yang telah mengembangkan pola kebiasaan memilih partai politik tersebut dalam beberapa pemilu. Jika dicermati, terlihat jelas bahwa Partai Golkar sebelumnya mempunyai posisi penting dalam persaingan politik di Indonesia, khususnya di Wilayah Jawa Barat VIII. Pada Pileg tahun 2004, Partai Golkar muncul sebagai kekuatan dominan dalam perolehan suara jika dibandingkan dengan partai politik lainnya. Total suara yang mereka raup 5.775.002 suara dan peroleh 28 kursi di DPRD Jawa Barat. Partai yang menyusul di posisi kedua adalah PDIP yang memperoleh 3.640.703 suara dan memperoleh 19 kursi. Lanjut ke Pemilu 2009 di Daerah Konstituen Jawa Barat VIII, Golkar berhasil meraup suara cukup besar yakni sebesar 261.582 (Pemilu Asia, 2019). Namun pada pemilu berikutnya tahun 2014, Golkar mengalami penurunan perolehan suara. Meski demikian, pada pemilu terakhir tahun 2019, Golkar kembali tampil sebagai pemenang dengan perolehan suara terbanyak di daerah pemilihan Jawa Barat VIII. Mereka memperoleh total 409.034 suara yang meliputi tiga kabupaten dan satu kota, yakni Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon.

Tabel 1. Daftar Nama dan Perolehan Suara Anggota DPR RI Dapil Jabar VIII

No.	Nama	Partai	Perolehan Suara
1	Daniel Mutaqien Syafuddin	Golkar	133.282
2	Dedi Wahidi	PKB	113.653
3	Ono Suro	PDIP	102.985
4	Dave Akbarshah Fikarno	Golkar	61.431
5	Netty Prasetiyani	PKS	57.047
6	Herman Khaeron	Demokrat	43.112
7	Selly Andriany Gantina	PDIP	40.026
8	Kardaya Warnika	Gerindra	37.866
9	Satori	Nasdem	28.294

Sumber: KPU 2019

Temuan tersebut mengindikasikan *Grassroot* masyarakat di Jawa Barat VIII masih condong kepada partai Golkar dalam setiap pemilihan legislatif. Tentunya loyalitas ini tersebut tidak terlepas dari strategi politik yang Golkar jalankan. Tanpa adanya strategi politik, perubahan jangka panjang sama sekali tidak dapat diwujudkan. Untuk bisa meraih cita-cita politik yakni menguasai suatu daerah, strategi politik harus dapat dioptimalkan. Penggunaan strategi politik tentu harus memiliki keterkaitan antara budaya politik lokal yang berkembang di masyarakat dengan kekuatan politik yang dijalankan partai.

Schroder (2013) menekankan pentingnya mengkaji strategi politik melalui pendekatan tiga fase, yang meliputi analisis skenario, pengambilan keputusan strategis, dan implementasi strategis. Penelitian ini fokus menganalisis strategi politik yang dijabarkan oleh Newman dan Sheth (1985). Newman dan Sheth (1985) dalam tulisannya mengidentifikasi sejumlah strategi politik yang diterapkan, yakni: (1) strategi penguatan mencakup pelaksanaan proses seleksi calon berdasarkan bukti pemenuhan janji-janji politik yang dibuat selama kampanye. Pengembangan dan pelaksanaan kebijakan yang pro-publik, populis dan strategi lainnya dapat digunakan untuk meningkatkan reputasi kandidat dalam pemilihan parlemen mendatang; (2) strategi rasionalisasi digunakan ketika kinerja seorang politisi atau partai politik tidak sesuai dengan citra yang telah mereka proyeksikan. Untuk menjaga persepsi masyarakat pada saat pemilu parlemen, strategi rasionalisasi harus digunakan; (3) Penggunaan strategi bujukan digunakan dalam situasi di mana citra kandidat di mata publik tidak sesuai dengan persepsi masyarakat, meskipun kinerja kandidat tersebut terpuji menurut persepsi pemilih; dan (4) Penggunaan strategi konfrontasi sangat penting bagi kandidat yang mempunyai persepsi publik yang salah. Kesenjangan antara citra yang ia tanam dan kinerja aktualnya mengharuskan adanya pembenahan menyeluruh baik dalam kepribadian publik maupun perilaku politiknya pada pemilu daerah berikutnya, dengan tujuan untuk menarik para pemilih yang semakin kritis dan cerdas. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang meliputi provinsi Jawa Barat secara umum, meskipun ketika berbicara dalam konteks politik lokal di Jawa Barat tidak bisa dilepaskan oleh kondisi ketiga wilayah tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman strategi politik yang dilakukan oleh partai politik, mengingat bagaimana kemenangan sebelumnya yang disebabkan oleh strategi politik yang matang dapat digunakan kembali dalam mendulang suara yang banyak pada kontestasi politik selanjutnya. Agar mendapatkan temuan yang lebih mendalam, maka kajian ini akan memfokuskan pada strategi politik Partai Golkar berdasarkan kemenangan pada pemilihan legislatif di Jawa Barat VIII Tahun 2019.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2016), bahwa penelitian kualitatif memerlukan pemeriksaan data tekstual secara komprehensif, penjelasan menyeluruh yang berasal dari sudut pandang partisipan, dan pelaksanaan investigasi dalam latar otentik. Untuk memperoleh data dan mencapai hasil penelitian kualitatif, penelitian ini akan fokus pada penggunaan prosedur yang tercakup dalam bidang tinjauan literatur seperti bahan ilmiah, termasuk bukti, karya tertulis, artikel, catatan, dan catatan sejarah. Menurut Creswell (2016), studi kasus berfungsi sebagai pendekatan studi di mana para sarjana dengan cermat mengkaji suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau kelompok orang. Setelah data diperoleh secara efektif, seperti yang dijelaskan oleh Templier dan Paré (2015), ada enam prosedur

menyeluruh yang terlibat dalam proses evaluasi artikel. Proses akademik melibatkan beberapa langkah kunci: 1) perumusan pertanyaan dan tujuan penelitian, 2) pencarian literatur yang ada, 3) penyaringan bahan-bahan yang relevan untuk dimasukkan, 4) penilaian kualitas studi dasar, 5) penilaian ekstraksi data terkait, dan 6) analisis data yang dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partai Golkar telah mengalami berbagai perubahan strategi politik pasca era reformasi. Menurut [Ananta dkk., \(2022\)](#), Partai Golkar merupakan salah satu partai terbesar dalam sejarah politik di Indonesia. Ketika terjadi reformasi dan perubahan politik, Golkar dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas berbagai tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, terutama karena keterlibatannya dalam pemerintahan orde baru. Partai ini menghadapi tekanan politik yang sangat intens dari berbagai segmen masyarakat dan kekuatan politik, yang mengadvokasi untuk pembubaran Golkar. Selain itu, berbagai hak istimewa yang sebelumnya dimiliki oleh Golkar selama masa Orde Baru harus dicabut sejalan dengan penerapan sistem politik yang demokratis. Golkar juga kehilangan dukungan dari militer dan birokrasi, yang sebelumnya merupakan sumber dukungan yang signifikan ([Tandjung, 2007](#))

Menurut [Tandjung \(2007\)](#), kenaikan posisi B.J. Habibie dari Golkar ke jabatan presiden memberikan peluang untuk melakukan konsolidasi dalam rangka mengantisipasi potensi kerugian yang dapat merugikan stabilitas partai ini. Keberadaan Golkar yang masih memegang pengaruh relatif kuat di berbagai tingkatan pemerintahan, DPR, dan MPR (legislatif), serta di tengah masyarakat, dianggap sebagai modal politik (political capital) yang krusial. Modal politik ini berperan sebagai suatu bentuk pengaman bagi Golkar agar tidak terlibat dalam kejatuhan bersama-sama dengan rezim Orde Baru yang sebelumnya didukungnya. Dalam konteks kehadiran politik yang baru, Golkar kemudian melakukan penyesuaian terhadap nilai-nilai dan melakukan restrukturisasi organisasi serta jaringan sebagai langkah adaptasi.

Dalam perkembangannya pasca reformasi, Partai Golkar berhasil mengalami transformasi menjadi partai modern yang mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi, termasuk demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pemilihan calon presiden dan ketua umum partai ([Roni, 2006](#)). Partai Golkar menyadari kelemahan-kelemahan yang ada selama Orde Baru, seperti kurang mandiri, tidak demokratis, dan bersifat patron-klien. Oleh karena itu, Golkar melakukan berbagai perubahan dengan menerapkan nilai-nilai baru yang bersifat demokratis, mandiri, berakar, dan responsif terhadap aspirasi rakyat (Paradigma Baru Partai Golkar) ([Golkar, n.d.](#)). Dengan demikian, meskipun terjadi perubahan, identitas inti partai tetap dijaga, sehingga Partai Golkar tetap mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam proses pemilihan umum ([Tandjung, 2007](#)).

Setelah berakhirnya Orde Baru, para pemimpin Partai Golkar berhasil menjadikan partai ini sebagai entitas politik yang mengusung paham sentrisme, mencakup berbagai golongan dengan semangat moderat. Di fase awal reformasi, di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung, Partai Golkar berhasil menavigasi masa transisi politik dan menjadi kekuatan politik yang signifikan pada era reformasi. Kepemimpinan Akbar Tandjung menandai langkah awal dalam demiliterisasi dengan mengecualikan kehadiran tokoh militer dalam struktur Golkar. Pada akhir tahun 1998, Golkar mendeklarasikan diri sebagai partai politik yang mengadopsi "semangat reformasi," yang berfokus pada prinsip keadilan, demokrasi, dan transparansi (Kompas, 2021).

Golkar memasuki babak baru dengan paradigma baru untuk menghadapi tekanan pembubaran dan mempersiapkan diri untuk Pemilu 1999. Beberapa prinsip paradigma baru yang diterapkan oleh Golkar mencakup upaya menerapkan mekanisme demokratis yang berasal secara *bottom-up* dalam pemilihan ketua umum melalui pemungutan suara langsung. Selanjutnya, Golkar menghapus sebutan "Orde Baru" dari pembukaan AD/ART sebagai manifestasi pemutusan hubungan dengan kekuasaan lama yang terpusat pada individu tertentu. Ketiga, Golkar menghilangkan lembaga seperti Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Penasehat yang telah menyebabkan kurangnya kemandirian organisasi. Keempat, mekanisme kepemimpinan tiga jalur yang dikenal sebagai ABG (ABRI, Birokrasi, Golkar) dihapuskan. Kelima, Golkar berupaya memulihkan kredibilitas organisasi dengan mengambil tindakan terhadap anggota yang terindikasi melakukan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Strategi ini meredam berbagai serangan terhadap partai (Kompas, 2021).

Dalam konteks kasus Partai Golkar, terlihat bahwa partai ini mampu mengalami adaptasi terhadap lingkungan politik yang tengah mengalami proses transisi menuju demokrasi. Sejak awal, Golkar mengambil posisi sebagai kekuatan politik yang terbuka (*catch-all party*) dan tidak mengikuti ideologi politik ekstrim, baik dari arah kiri maupun kanan, sehingga dapat dikategorikan sebagai Partai Tengah. Pendekatan politik yang moderat dan terbuka tersebut memungkinkan Partai Golkar untuk bersifat fleksibel dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam lingkungan politik. Dengan demikian, implikasinya adalah bahwa partai-partai politik yang menganut paham sektarian dan bersifat tertutup, akan menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan politik baru yang bersifat terbuka dan plural. Hal ini dikarenakan, perubahan tersebut memerlukan transformasi yang drastis pada paham ideologis partai-partai tersebut (Tandjung, 2007).

Di samping itu, Tandjung (2007) menyatakan bahwa nilai-nilai dan budaya memiliki peranan yang sangat krusial untuk kelangsungan eksistensi Partai Golkar, terutama dalam konteks identitas dan koherensi internal partai tersebut. Oleh karena itu, Partai Golkar tetap memegang teguh nilai-nilai dasar yang telah menjadi ciri khasnya selama periode Orde Baru. Selama Era Reformasi, Partai Golkar memfokuskan perhatiannya pada budaya

politik, pola kaderisasi, dan upaya untuk mendapatkan dukungan masyarakat melalui mekanisme pemilihan umum (Kompas, 2023). Dalam periode ini, Partai Golongan Karya mengalami transformasi yang signifikan dalam strategi politiknya. Beberapa aspek kunci dari strategi partai selama fase ini akan diuraikan selanjutnya.

Konsolidasi Sebagai Penguatan Citra dan Internal Partai

Berbagai kasus yang menimpa partai Golkar membuat perubahan yang signifikan terhadap perkembangannya (Azwar, 2009). Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto mencoba melakukan reformasi internal partai pasca ditangkapnya mantan Ketua Umum Golkar, Setya Novanto dan dualisme kepemimpinan juga sempat membayangi partai (Suryadinata, 2007). Sejalan dengan tuntutan era reformasi, Golkar bertujuan menjadi partai politik yang terbuka, inklusif, mandiri, demokratis, moderat, solid, mengakar, dan responsif (Nurjaman, 2018). Hal ini berbeda dengan peran mereka sebelumnya sebagai organisasi pro-pemerintah di bawah rezim Suharto (Britannica, 2014). Golkar juga melakukan upaya untuk mereformasi citranya dengan menjauhkan diri dari politisi yang dianggap terlalu dekat dengan mantan presiden Suharto dan militer (Bulkin, 2013). Mundurnya Titeik Soeharto dari Partai Golkar dianggap sebagai peluang untuk mewujudkan Golkar dengan paradigma baru dan melepaskan diri dari pengaruh dominan Presiden kedua Soeharto yang memerintah selama 32 tahun di Indonesia. Golkar dengan paradigma baru beroperasi sesuai dengan misi yang baru, tidak dapat dipaksa untuk menyertakan preferensi keluarga Cendana dalam proses pengambilan kebijakan partai (Viva, 2018). Strategi politik ini sejalan dengan apa yang disampaikan Newman dan Sheth (1985) bahwa membangun citra ini menjadi bagian strategi politik model penguatan, yang mana penting bagi keberhasilan partai di era pasca reformasi agar pemilih tidak salah menilai terhadap citra partai Golkar. Secara keseluruhan, walaupun informasi mengenai fokus kebijakan spesifik Partai Golkar pasca era reformasi masih terbatas, tampaknya partai tersebut berupaya melakukan reformasi internal partai dan menekankan pada pembangunan ekonomi (Creagh dkk., n.d.; Salabi, 2021).

Salah satu strategi politik yang telah dijalankan yaitu strukturalisasi kebijakan partai, perbaikan yang dimaksud adalah dalam penyelenggaraan musyawarah daerah tidak boleh lagi menggunakan politik uang dan penghapusan biaya pendaftaran menjadi calon kepala daerah, calon anggota legislatif, dan administrator partai di berbagai tingkat atau ranting. Kemudian, perubahan di dalam partai juga dimulai dengan reformasi partai ramah pemuda dan generasi muda diberikan Pendidikan politik dan direkrut menjadi kader melalui Golkar Institute. Strategi ini dianggap berpengaruh bagi masyarakat untuk dapat memilih sumber daya yang kompeten yang duduk di parlemen. Adapun calon yang berasal dari Golkar telah dianggap kompeten dengan standar kaderisasi yang ditetapkan Golkar. Seperti yang diketahui saat ini elektabilitas partai juga tidak terlepas terhadap elektabilitas kader yang dimiliki; Secara umum, tingkat kepuasan pada partai politik itu rendah, namun elektabilitas tokoh lebih tinggi dibanding partainya, sehingga dapat

disimpulkan juga bahwa dominasi tokoh partai yang memiliki citra yang baik tentunya juga dapat mendongkrak citra partai (Kompas, 2012).

Selain itu, untuk menjamin lahirnya anggota DPR yang berkompeten, baik dari segi kepatuhan prosedur maupun kualitas personel, partai menerapkan aturan yang melarang calon legislatif yang terafiliasi dengan partai berlambang pohon beringin itu untuk ikut serta dalam pemilu 2019 agar tidak terlibat dalam proses hukum apa pun, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Meski dari segi hukum, UU Pemilu tidak secara tegas melarang individu yang pernah melakukan tindak pidana seperti korupsi, narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, atau kejahatan terhadap anak di bawah umur untuk menjadi calon anggota parlemen. Dari sudut pandang psikologi politik, terlihat bahwa masyarakat mencari individu atau calon legislatif yang paling cocok untuk menjadi wakilnya. Oleh karena itu, Partai Golkar saat ini sedang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap latar belakang kriminal seluruh calon anggota legislatif yang terafiliasi dengan Golkar di Jawa Barat VIII. Inisiatif ini bertujuan untuk membangun database komprehensif yang dapat meyakinkan masyarakat bahwa calon wakil presiden pilihan mereka memiliki integritas yang teguh. Selanjutnya, dalam konteks nyata, masih terdapat beberapa Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Golkar yang terkait dengan kasus hukum. Partai Golkar mengambil sikap untuk mempertimbangkan pemberian bantuan hukum melalui Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Partai Golkar kepada rekan sesama partai yang membutuhkan dukungan hukum terkait berbagai kasus. Meskipun demikian, Golkar tetap menjunjung prinsip praduga tak bersalah dan akan menunggu hingga kasus yang melibatkan kader tersebut memiliki keputusan hukum yang final. Selain itu, Golkar akan secara teliti mengkaji dan mempelajari kasus yang menimpa kader tersebut sebelum mengambil langkah-langkah selanjutnya dalam kebijakan partai.

Namun, situasi di lapangan menunjukkan bahwa dalam proses pendaftaran Pemilihan Legislatif 2019, masih terdapat Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Golkar yang memiliki status mantan narapidana. Meskipun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar sedang berupaya melakukan perbaikan untuk menghidupkan semangat "Golkar Bersih," pencalonan mantan narapidana tersebut dianggap memiliki dasar yang dapat dijelaskan secara rasional. Menurut pembelaan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar di wilayah Sumatera, Ahmad Doli Kurnia, kehadiran mereka sebagai Caleg disebabkan oleh peran mereka sebagai pemimpin daerah, yang direkomendasikan oleh daerah setempat dan didukung oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) kabupaten/kota masing-masing. Alasan pemberian dukungan ini adalah bahwa Caleg mantan narapidana ini memiliki basis konstituen yang jelas, sehingga diyakini bahwa perolehan suaranya dapat meningkatkan elektoral partai. Selain alasan dukungan dari DPD kabupaten/kota, setiap individu juga memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan diri. Oleh karena itu, Partai Golkar memberi kesempatan kepada mereka untuk mengajukan gugatan terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) ke

Mahkamah Agung (MA) yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi Caleg (Tempo, 2018). Selanjutnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, memilih untuk membiarkan masyarakat menentukan pilihan mereka berdasarkan rekam jejak Caleg yang bersangkutan. Ace menegaskan bahwa mekanisme internal partai di setiap tingkatan memiliki kewenangan dalam mengusulkan calon legislatif kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Ace juga mengingatkan bahwa tidak ada Caleg eks narapidana koruptor yang diusulkan oleh DPP Partai Golkar ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Berdasarkan data yang dirilis oleh KPU (2019), tercatat ada 81 mantan narapidana korupsi yang mendaftar sebagai Caleg, dan Partai Golkar termasuk sebagai penyumbang Caleg eks narapidana korupsi terbanyak dibandingkan dengan Hanura dan Demokrat (CNN Indonesia, 2019).

Lebih lanjut pemberian pendidikan politik bagi generasi muda dan kader adalah upaya menciptakan kader yang berkualitas yang dilakukan Partai Golkar melalui Golkar Institute. Syadzily (2021) selaku Ketua Dewan Pengurus Golkar Institute mengatakan bahwa "Golkar Institute sebagai sekolah partai diharapkan mencetak kader dengan kepemimpinan politik yang transformatif, kompeten, inovatif, berintegritas, memiliki etos kerja yang tinggi dan berdaya saing dalam mewujudkan *good governance* menuju Indonesia maju". Kemudian, pembedaan lainnya sebagai strategi politik jenis penguatan seperti yang Newman dan Sheth (1985) yaitu dihidupkannya kembali sayap-sayap partai seperti Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). Selain itu, Partai Golkar memiliki strategi komunikasi politik yang efektif yang ditandai dengan kemenangan beberapa calonnya di kancah politik lokal di berbagai daerah di Indonesia dalam beberapa periode, terlepas dari kasus dualisme kepemimpinan yang muncul di beberapa partai besar di Indonesia dan politik klan membayangi partai ini (Fakhruroji & Muchtar, 2018; Ridha, 2016).

Menurut Priamarizki (2023), aparaturnya politik Golkar yang mumpuni, serta pengaruh politik yang dimiliki para elite dan anggotanya, merupakan sumber daya vital yang berkontribusi terhadap pencapaian elektoral partai tersebut. Besar kecilnya pengaruh politik Partai Golkar dapat dilihat dari penelusuran laporan sumbangan Golkar kepada KPU pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Jawa Barat VIII. Sumbangan ini dinilai paling besar di antara seluruh partai politik peserta pemilu (KPU, 2019). Pemanfaatan sumber daya tersebut sebagai taktik politik juga berkontribusi terhadap keberhasilan partai dalam menggalang dukungan dan melakukan kampanye secara efektif di Jawa Barat VIII. Kemenangan Partai Golkar dalam perolehan suara terbanyak pada pemilu legislatif kedelapan di Jawa Barat tidak lepas dari alokasi sumber daya yang strategis bagi partai tersebut untuk mendukung calon legislatifnya pada masa kampanye. Logistik yang

dipertimbangkan meliputi berbagai perlengkapan kampanye, antara lain spanduk, bendera, dan kaos.

Selain itu, Partai Golkar juga menekankan pentingnya kolaborasi antar kadernya yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif, untuk bersama-sama menyusun strategi dan memetakan upaya mencapai tujuan memperoleh dukungan pemilih. Partai Golkar mengutamakan kohesi internal dengan mengedepankan pendekatan non-kompetitif antar sesama calon anggota DPRD Golkar, para kader harus menahan diri dari ego pribadi dan mengedepankan tujuan bersama di dalam partai, khususnya kemenangan Partai Golkar pada pemilu 2019 mendatang. Selain itu, Partai Golkar juga menawarkan program pelatihan kepada individu yang akan menjadi saksi selama proses pemungutan suara. Menurut Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar saat ini, Partai Golkar bermaksud mengusulkan inisiatif yang akan menarik perhatian dan mendapat dukungan dari masyarakat umum. Faktor-faktor ini mencakup harga bahan pangan yang terjangkau dan adanya prospek pekerjaan.

Selain itu, sebagaimana propaganda politik partai pada umumnya, partai Golkar juga memiliki berbagai program terkait isu-isu populis seperti mendorong kedepannya agar penyediaan desain perumahan yang tahan bencana, dengan struktur yang lebih ringan dan struktur yang lebih kuat. Kemudian, pendekatan personal secara *face to face* adalah sebuah hal yang wajib, sebagaimana dikatakan oleh salah satu kader partai Golkar yang berhasil meraih kursi legislatif 2019 bahwa kampanye dengan berkomunikasi dari hati ke hati langsung kepada masyarakat punya kecerdasan dalam memilih calon legislatif Jawa Barat VIII. Partai Golkar juga meminta Calon legislatif Golkar membuat inovasi atau gebrakan-gebrakan baru yang unik serta populer yang bisa membuat masyarakat mau untuk memilih Golkar. Diharapkan kepada calon legislatif Golkar untuk melakukan kampanye akan program partai Golkar kepada masyarakat tentang harapan bersama Golkar, hidup mudah, murah dan berkah (Mulyadi, 2018). Strategi politik dengan pendekatan *psychological operations* ini berpengaruh besar dalam kemenangan Golkar dalam kontestasi politik tahun 2019 di wilayah tersebut. Adanya pendekatan tersebut menjadi strategi politik yang berhasil, terbukti oleh suara tinggi yang diraup partai Golkar dalam pemilihan tersebut. Kemudian, terdapat pula caleg Partai Golkar yang memberikan advokasi hukum gratis masyarakat yang kurang mampu dan miskin, tidak mengerti ataupun memahami masalah hukum dalam kampanyenya (Jatimnet.com, 2019).

Syadzily (2023) yang juga Ketua DPD Golkar Jawa Barat, menjelaskan dasar kerja partai dalam proses pembentukan kader. Hal ini dilakukan untuk mendukung anggota legislatif Golkar pada pemilihan Wilayah Jawa Barat VIII Tahun 2019. Ia menguraikan empat pilar utama kerja Golkar: ekonomi dan lapangan kerja, kesejahteraan sosial, demokrasi yang berkeadilan, dan pelayanan publik, pertahanan dan keamanan. Pemanfaatan teknologi semakin meluas di dunia saat ini. Semakin banyak orang yang memanfaatkan peluang yang diberikan oleh teknologi modern, dan kehadirannya

menjadi semakin lazim. Dari ponsel pintar hingga tablet, perangkat yang tersedia untuk umum sangat beragam dan aplikasinya juga banyak. Ketika teknologi terus berkembang, pengaruhnya terhadap masyarakat akan semakin meningkat. Untuk mempercepat pembangunan, Syadzily (2023) menyebutkan upaya transformasi perekonomian Indonesia menjadi ekonomi digital; meningkatkan pengetahuan digital dan akses internet; mendukung bisnis *start-up*; dan mengembangkan energi hijau, industri hijau, dan pengumpulan data. Selain itu, Golkar berupaya merehabilitasi ekosistem pesisir dan laut.

Apa yang dipaparkan Syadzily (2023) diatas sejalan strategi politik penguatan yang mana memberikan tawaran memihak masyarakat sesuai dengan kebijakan utama Golkar yang berfokus pada pembangunan yakni pembangunan ekonomi melalui liberalisasi (Bulkin, 2013). Partai tersebut mendukung kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat sekaligus menjaga stabilitas politik (Britannica, 2014). Partai Golkar telah menguraikan konsep pembangunan tiga tahap. Tahap pertama yang berlangsung pada tahun 2015 hingga 2025 bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia menjadi US 10.000 - US 12.000. Setelah tahap ini, tahap kedua, yang ditetapkan pada tahun 2025 hingga 2035, menargetkan kisaran pendapatan per kapita sebesar US\$ 21.000 - US\$ 23.000. Terakhir, tahap ketiga, pada tahun 2035 hingga 2045, menetapkan tujuan mencapai pendapatan per kapita antara US 41.000 - US 43.000. Lebih lanjut, Muhammad (2013) yang sempat menjabat Wakil Ketua Umum Partai Golkar pada periode 2009-2011 meyakinkan bahwa Partai Golkar akan mengutamakan pembangunan yang berkualitas dan berupaya mendorong stabilitas politik. Golkar juga berjanji untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat mengenai stabilitas politik dan ekonomi. Selain itu, Golkar memposisikan diri sebagai kekuatan yang kompeten dan mampu memimpin pembangunan negara, serta menanamkan rasa percaya diri masyarakat Jawa Barat VIII. Klaim legitimasi ini diperkuat oleh keahlian teknis dan pengalaman bisnis para kader Golkar (Bulkin, 2013).

Untuk dapat menjalankan kebijakan ekonominya, Golkar melakukan strategi politiknya bergabung dengan koalisi yang berkuasa. Setelah jatuhnya Suharto, Golkar bergabung dengan koalisi yang berkuasa di bawah presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo. Strategi Golkar yang mencakup semua hal, yang berfokus pada mengakomodasi basis pemilih yang lebih besar, telah mendapatkan popularitas di kalangan partai politik di Indonesia (Priamarizki, 2023). Pendekatan ini berarti sedikit menjauh dari inti ideologi partai dan mengambil sikap yang lebih pragmatis untuk menarik lebih banyak pemilih. Pendekatan ini termasuk dalam strategi rasionalisasi yang mana adanya kemungkinan akan partai untuk mempertahankan pengaruhnya sambil mengakomodasi kepentingan mitra koalisi lainnya di tingkat daerah (Newman & Sheth, 1985). Hal ini menunjukkan kesediaan partai untuk bekerja dalam sistem demokrasi baru dan berkolaborasi dengan aktor politik lainnya. Lebih lanjut, keluwesan strategi politik Golkar juga terlihat pada tahun 2016, Golkar mengalihkan kesetiaannya dari koalisi oposisi yang dipimpin Prabowo Subianto ke

pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kebijakan partai yang memilih bergabung dalam koalisi juga terlihat dari strategi politiknya dengan dukungan dari Fraksi Partai Golkar yakni mendorong dan mendukung segera diselesaikannya Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK). RUU ini penting untuk mempersiapkan sektor keuangan Indonesia menghadapi ketidakpastian dan guncangan perekonomian akibat krisis multidimensional di masa-masa yang akan datang. Koalisi dengan partai lain juga dibangun Golkar dalam hal menentukan posisi-posisi strategis ditingkat legislatif, seperti penyusunan alat kelengkapan DPR, seperti pimpinan dewan, panitia anggaran, panitia musyawarah, panitia legislasi dan badan kehormatan. Walaupun langkah ini menunjukkan adanya pragmatisme partai, namun ini adalah strategi politik partai Golkar sebagai fokusnya dalam mempertahankan relevansi dan pengaruhnya dalam lanskap politik (Newman & Sheth, 1985).

Mobilisasi dan Pemetaan Politik Lokal

keberhasilan pemilu daerah pemilihan di wilayah Jawa Barat VIII ditentukan oleh banyak aspek, salah satunya peran partai politik melalui organisasi sayap partai (OSP) yang kedudukannya berdasarkan teori pengikatan tidak bisa dipisahkan dari partai politik. Ada sejumlah organisasi sayap di tubuh Partai Golkar yang setia mendorong pertumbuhan dan kemajuan partai. Contoh organisasi tersebut antara lain KOSGORO, SOKSI, MKGR, dan AMPI. Fakta bahwa pimpinan masing-masing kelompok tersebut adalah kader terkemuka Golkar menunjukkan keperkasaan Golkar di Jawa Barat VIII. Karena mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk pemuda, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, Partai Golkar mempunyai pengikut yang sangat kuat. Dukungan biasanya diberikan dalam bentuk keikutsertaan dalam sosialisasi kader atau calon Golkar yang maju dalam pemilu. Tindakan memperkenalkan calon potensial kepada kelompok atau masyarakat disebut sosialisasi terhadap pemilihan kedepan.

Dalam proses pemilu 2019, Partai Golkar, khususnya di daerah Jawa Barat VIII, menyusun rencana strategis yang bertujuan untuk mengamankan kemenangan calon legislatif yang diusungnya. Rencana ini melibatkan penggunaan pendekatan yang kuat terhadap organisasi massa terkemuka di masyarakat. Partai Golkar aktif menjalin hubungan dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sejak era orde baru. Selain aspek-aspek yang disebutkan di atas, ketidakhadiran yang menonjol dalam pertarungan politik tahun 2019 berkaitan dengan pentingnya kandidat dan partai yang terus memasukkan temuan-temuan dari penelitian opini publik ke dalam perumusan taktik kampanye dan agenda kebijakan menjadi strategi penguatan politik yang dilakukan oleh partai Golkar. Sejak dimulainya pemilihan presiden pertama yang melibatkan masyarakat umum secara langsung, lembaga-lembaga survei terkemuka telah mencapai keberhasilan dalam memperkirakan hasil pemilu secara akurat, dan hasilnya sangat selaras dengan perhitungan manual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Untuk melihat aspirasi konstituen di daerah pemilihan Jawa Barat VIII, maka penting bagi calon legislatif agar secara aktif melibatkan dan memanfaatkan keahlian lembaga penelitian dan survei sebagai konsultan politik. Pemanfaatan lembaga survei untuk kepentingan kelembagaan oleh partai politik pertama kali diperkenalkan oleh Partai Golkar di bawah kepemimpinan Jusuf Kalla. Pada periode tersebut, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Golkar menerbitkan Pedoman Pelaksanaan (Juklak) Nomor 5 Tahun 2006 yang menguraikan keharusan partai menggunakan metodologi survei dalam rangka seleksi dan penetapan calon pimpinan daerah. Menurut Mietzner (2009), pemanfaatan survei berperan besar dalam membentuk gambaran kejayaan Golkar yang mengalami peningkatan dari 37 persen pada Februari 2006 menjadi 47 persen pada tahun 2007. Keberhasilan suatu kampanye juga dipengaruhi oleh ketentuan data survei yang dianggap kredibel. Kandidat yang memiliki dukungan data survei yang andal akan memiliki kapasitas untuk merumuskan agenda dan strategi politik yang kondusif bagi keberhasilan kampanye. Para calon legislatif Golkar di daerah pemilihan Jawa Barat VIII pun memanfaatkan temuan survei sebagai sarana mengumpulkan dana kampanye politik. Menurut Trihartono (2014), kandidat yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi cenderung mempunyai kecenderungan lebih besar untuk mendapatkan sumber pendanaan politik.

Salah satu aspek yang konsisten terlihat dalam pemilu 2019 adalah pemanfaatan organisasi konsultan profesional oleh para kandidat. Pemanfaatan konsultan pada pemilu 2019 mengalami peningkatan yang signifikan di Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII. Perluasan ini mencakup cakupan konsultan yang lebih luas, transisi dari konsultan politik dan media, seperti yang terjadi pada pemilu tahun 2014, menjadi konsultan teknologi informasi, spesialis big data, dan konsultan media sosial. Munculnya perluasan akses pemilih terhadap platform media sosial telah meningkatkan fokus calon legislatif Golkar di Jawa Barat VIII untuk melibatkan dan menarik calon pemilih melalui saluran digital ini. Pemanfaatan jasa konsultan politik oleh partai politik didorong oleh beberapa faktor. Pertama, para profesional partai sering menghadapi keterbatasan sumber daya, yang membatasi kemampuan mereka untuk menggunakan keterampilan teknis secara efektif di berbagai bidang seperti melakukan survei, mengembangkan iklan, dan menganalisis kumpulan data yang besar. Kedua, partai politik memprioritaskan pengelolaan pemilih sebagai aspek kunci dalam operasionalnya, sehingga memerlukan keterlibatan konsultan politik. Pemanfaatan dan penyesuaian platform media sosial dalam kampanye pemilu mulai diterapkan oleh partai politik pada pemilu tahun 2019. Berdasarkan liputan Wagunu dkk., (2019), Partai Golkar memanfaatkan pemanfaatan Big data yang berasal dari platform media sosial untuk merumuskan strategi politik. Strategi-strategi ini dirancang untuk secara efektif mengatasi perubahan demografi pemilih, khususnya meningkatnya kehadiran pemilih milenial dan peningkatan aksesibilitas masyarakat luas terhadap internet dan media sosial. Pendekatan ini memungkinkannya partai untuk menyesuaikan agenda kampanyenya.

KESIMPULAN

Setelah era reformasi, Golkar berhasil menunjukkan keahlian politiknya dengan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan wilayah Jawa Barat VIII. Agar tetap eksis, Golkar perlu mengubah citra lama yang dianggap sebagai warisan alat politik orde baru, dan mengadopsi paradigma baru yang sesuai dengan perkembangan pasca reformasi. Adapun keputusan Golkar membentuk citra partai yang solid yakni melakukan konsolidasi internal kader partai dan cabang lapangan, dengan memprioritaskan penghapusan politik uang dan biaya pendaftaran pemilu. Kemudian, partai menekankan solidaritas internal dan melatih saksi untuk membantu proses pemungutan suara. Fokus utamanya adalah pada pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi. Partai Golkar menggunakan pendekatan tatap muka, menyeleksi calon legislatif melalui komunikasi langsung dengan masyarakat cerdas. Partai ini telah memperluas penggunaan konsultannya, termasuk teknologi informasi, spesialis Big Data, dan konsultan media sosial, untuk beradaptasi dengan perubahan demografi pemilih dan beradaptasi dengan perubahan demografi pemilih. Partai Golkar juga menggunakan data survei yang kredibel untuk memastikan efektivitas kampanye dan mengumpulkan dana melalui sumbangan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, M., Harahap, R., Kusmanto, H., & Simatupang, I. (2022). Political Culture of the Golkar Party in North Sumatra Post Reformation. *Proceedings of the 4th International Conference on Social and Political Development*, 150–155. <https://doi.org/10.5220/0011562900003460>
- Areza, T. S. M., Akbar, F., Ikhsan, E., & Nasution, M. (2023). Demokratisasi Dalam Proses Rekrutmen Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia. *Grondwet*, 2(1), 192–210. <https://ejournal.grondwet.id/index.php/gr/article/view/17>
- Azwar, R. C. (2009). *Politik komunikasi Partai Golkar di tiga era : dari partai hegemonik ke partai yang berorientasi "Pasar."* Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2020, July 13). *Perolehan Suara dan Kursi DPR Menurut Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif 2019*. Badan Pusat Statistik.
- Britannica, T. E. of E. (2014). *Golkar*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/Golkar>
- Bulkin, N. (2013). *Indonesia's Political Parties*. Carnegie Endowment for International Peace. <https://carnegieendowment.org/2013/10/24/indonesia-s-political-parties-pub-53414>

- CNN Indonesia. (2019). *Golkar soal 10 Caleg Eks Koruptor: Biar Rakyat yang Tentukan*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190220110618-32-370985/golkar-soal-10-caleg-eks-koruptor-biar-rakyat-yang-tentukan>
- Creagh, S., Anjani, K., Nathalia, T., & Rondonuwu, O. (n.d.). *Factbox: party policies in Indonesian elections*. Reuters. Retrieved August 2, 2023, from <https://jp.reuters.com/article/us-indonesia-elections-policies-factbox-idUSTRE53702C20090408>
- Creswell, J. W. (2016). *Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran* (Terjemahan). Pustaka pelajar.
- Djuyandi, Y., & Akbar, A. H. B. M. (2023). Strategi Pemenangan Partai Golkar dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.23960/JASP.V7I1.106>
- Fakhruroji, M., & Muchtar, K. (2018). Campaigning #golkarsolid: Branding Image Strategy of Golkar Party on Social Media. *Proceedings of the International Conference on Media and Communication Studies*, 210–214. <https://doi.org/10.2991/icomacs-18.2018.52>
- Golkar. (n.d.). *Visi & Misi Partai Golkar*. PartaiGolkar. Retrieved December 11, 2023, from <https://www.partaigolkar.com/visi-dan-misi/>
- Jatimnet.com. (2019). *Caleg Golkar ini Berikan Bantuan Hukum Gratis*. Jatimnet.Com. <https://jatimnet.com/caleg-golkar-ini-berikan-bantuan-hukum-gratis-1555193603>
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2019a). *Hasil hitung suara legislatif DPR RI 2019*. Komisi Pemilihan Umum. <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprri/hitung-suara/>
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2019b). *KPU RI Tetapkan Perolehan Kursi Parpol dan Calon Terpilih DPR-DPD 2019-2024*. Komisi Pemilihan Umum. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/7675/Usai-berakhirnya-sidang-PHPU-Legislatif-2019-di-MK--KPU-RI-langsung-merespon-dengan-menggelar-Rapat-Pleno-Penetapan-Terbuka-Penetapan-Kursi-dan-Calon-Terpilih-Anggota-DPR-dan-DPD-hasil-Pemilu-2019--Sabtu--31-8-2019>
- Kompas. (2012). *Tingkat Kepuasan Masyarakat Pada Kinerja Partai Politik, Rendah*. Kompas.Id. <https://nasional.kompas.com/read/2012/08/13/01314188/index.html>
- Kompas. (2021, October 26). *Partai Golongan Karya (Partai Golkar)*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/lembaga/2021/10/26/partai-golongan-karya-partai-golkar>

- Kompas. (2023). *Pemilu 1971: Pemilu Pertama Orde Baru dan Awal Dominasi Golkar*. Kompas Pedia. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/pemilu-1971-pemilu-pertama-orde-baru-dan-awal-dominasi-golkar>
- Kurnia, A. D. (2021, October 21). *Golkar Ingin Ulang Kejayaan di Pemilu 2004*. Republika Online. <https://news.republika.co.id/berita/r1a31v396/golkar-ingin-ulang-kejayaan-di-pemilu-2004%C2%A0>
- Mietzner, M. (2009). Political opinion polling in post-authoritarian Indonesia: Catalyst or obstacle to democratic consolidation? *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 165(1), 95–126. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003644>
- Muhammad, F. (2013). *Golkar siapkan konsep ekonomi sampai 2045*. Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/golkar-siapkan-konsep-ekonomi-sampai-2045>
- Mujani, S. (2023). *Peta Pertarungan Politik di Jawa Barat*. Saiful Mujani Research & Consulting. <https://saifulmujani.com/peta-pertarungan-politik-di-jawa-barat/>
- Mulyadi, D. (2018, November 9). *Dedi Mulyadi Ingatkan Sesama Caleg Golkar Jangan Saling Sikut*. Harapan Rakyat. <https://www.harapanrakyat.com/2018/11/dedi-mulyadi-ingatkan-sesama-caleg-golkar-jangan-saling-sikut/>
- Newman, B. I., & Sheth, J. N. (1985). A Model of Primary Voter Behavior. *Journal of Consumer Research*, 12(2), 178–187. <https://doi.org/10.1086/208506>
- Nida, D. A. D. T. P. P., & Simarmata, N. (2014). Hubungan Antara Komitmen Organisasi dan Perilaku Kewargaan Organisasi pada Fungsiaris Partai Golkar di Bali. *Jurnal Psikologi Udayana*, 1(2), 279–290. <https://doi.org/10.24843/JPU.2014.v01.i02.p07>
- Nisa, N. I., Naim, M., & Umamah, N. (2017). Strategy of Golongan Karya to be Winner in Election Year 1971-1997. *JURNAL HISTORICA*, 1(1), 141–151.
- Nurjaman, A. (2018). Masa Depan Faksionalisme Politik Golkar Pasca Orde Baru. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 4(2), 34–48. <https://doi.org/10.22219/SOSPOL.V4I2.5953>
- Pemilu Asia. (2019). *Pemilu DPR 2019*. <http://www.pemilu.asia/?lang=ind&c=54&opt=1&s=139&id=13>
- Priamarizki, A. (2023). *Golkar and the 2024 General Election: Internal Consolidation and Electoral Improvement*.
- Puspita, N. E. (2012). Strategi politik dan kemenangan Golkar di semarang pada pemilu 1971. *Journal of Indonesian History*, 1(1), 30–34. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih/article/view/2222>

- Ridha, M. (2016). Dilema pelebagaan partai golongan karya (golkar) di tingkat lokal: fenomena politik klan. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 160–182. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11855>
- Roni, H. (2006). *Demokratisasi internal partai golkar pasca orde baru (1998-2004)*. Universitas Indonesia.
- Salabi, A. (2021). *Youth Movement in Political Party Reform*. Electionhouse.Org. <https://electionhouse.org/post/read/55/youth-movement-in-political-party-reform>
- Schroder, P. (2013). *Strategi politik*. Feiedrich Naumann Stiftung Fur Die Freiheit .
- Suhawi, A. (2018). *Pseudo partai politik: studi perbandingan PKS, GOLKAR dan PDIP*. Rajawali Pers.
- Suryadinata, L. (1989). *Military ascendancy and political culture: a study of Indonesia's Golkar*. Center for International Studies of Ohio University.
- Suryadinata, L. (2007). The Decline of the Hegemonic Party System in Indonesia: Golkar after the Fall of Soeharto. *Contemporary Southeast Asia*, 29(2), 333–358. <https://doi.org/10.1355/CS29-2F>
- Syadzily, A. H. (2021). *Pembukaan Pendidikan Politik DPD Golkar Jabar, Ace Hasan: Pendidikan Politik di Golkar Bukan Kaleng-Kaleng*. Golkarinstitute.Org. <https://golkarinstitute.org/pembukaan-pendidikan-politik-dpd-golkar-jabar-ace-hasan-pendidikan-politik-di-golkar-bukan-kaleng-kaleng-2/>
- Syadzily, A. H. (2023). *Ingin Sejarah Terulang, Golkar Bertekad Jadi Partai dengan Kemenangan Mayoritas di Jabar*. Pikiran Rakyat. <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-017032543/ingin-sejarah-terulang-golkar-bertekad-jadi-partai-dengan-kemenangan-mayoritas-di-jabar?page=2>
- Tandjung, A. (2007). *Partai Golkar Dalam Pergolakan Politik Era Reformasi: Tantangan Dan Respons*. Universitas Gadjah Mada.
- Templier, M., & Paré, G. (2015). A framework for guiding and evaluating literature reviews. *Communications of the Association for Information Systems*, 37, 112–137. <https://doi.org/10.17705/1CAIS.03706>
- Tempo. (2018). *Golkar Daftarkan Caleg Mantan Narapidana Korupsi*. Tempo.Co. <https://pemilu.tempo.co/read/1108406/golkar-daftarkan-caleg-mantan-narapidana-korupsi>
- Trihartono, A. (2014). Beyond Measuring the Voice of the People: The Evolving Role of Political Polling in Indonesia's Local Leader Elections. *Southeast Asian Studies*, 3(1), 151–182.

- Viva. (2018). *Soeharto dan Keluarga Cendana Dinilai Rugikan Golkar*. Viva.Co.Id. <https://www.viva.co.id/berita/politik/1044844-soeharto-dan-keluarga-cendana-dinilai-rugikan-golkar>
- Wagunu, A. T. W., Rinaldi, I., & Wisanggeni, S. P. (2019, January 30). *Caleg Manfaatkan Data Digital*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/01/30/caleg-manfaatkan-data-digital>
- Yuda AR, H. (2011). *Faktor-faktor penyebab penurunan perolehan suara Partai Golkar di Pemilu 2009*. Universitas Indonesia.